



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

RENCANA KERJA TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono Km.2 Telp (0281) 891235
PURBALINGGA 53371

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT – Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rakhmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Renja OPD ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga selama periode tahun 2024.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik dan dapat diketahui secara pasti arah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir tahun atas dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, semoga Renja OPD ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai target, Amien.

Purbalingga, Maret 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

DPMPTSP

Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19681022 199402 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Landasan Hukum	1
3.1 Maksud dan Tujuan	3
4.1 Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (Memuat Program Dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif)	32
BAB V. PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan RKPD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

RKPD sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2024.

Penyusunan Renja mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program, kegiatan serta sub kegiatan yang berasal dari Masyarakat, Renja DPMPTSP 2024 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Selanjutnya Renja DPMPTSP 2024 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 didasarkan pada :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Bebas Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026;
17. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga;

18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dimaksudkan :

1. Untuk menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perencanaan OPD setelah adanya anggaran kegiatan dan sub kegiatan.
2. Menggambarkan target capaian kinerja yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal dan bidang perizinan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PADA TAHUN LALU

Bab II ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP, Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP, Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi DPMPTSP, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga merupakan perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. Laporan hasil kinerja sepanjang tahun 2022 yang lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga untuk Pos Anggaran Belanja Langsung Pagu anggaran sebesar Rp. 4.329.242.000,00 terealisir sebesar Rp.4.199.503.201,00 atau 97,00 % dari pagu anggaran sehingga ada penghematan anggaran sebesar Rp. 129.738.799,00 atau 3,00 %, adapurn rincianya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp 3.027.431.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.971.410.345,00 (98,15 %) dengan efisiensi sebesar Rp 56.020.655,00 (1,85 %). Program ini dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 7.850.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 7.762.000,00 (98,88 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 88.000,00 (1,12 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.850.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.821.000,00 (98,98 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 29.000,00 (1,02%). Keluarannya berupa tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah (renja, rka).

a.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 4.941.000,00 (98,82 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 59.000,00 (1,18%). Keluarannya berupa tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah. (LKJiP, LKPJ, LPPD, Lap. Aset, RB)

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.590.746.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.552.196.882,00 (98,51 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 38.549.118,00 (1,49%). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.476.777.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.439.390.131,00 (98,49 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 37.386.869,00 (1,51 %). Keluarannya berupa terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN sejumlah 21 orang

b.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pagu anggaran sebesar Rp. 59.344.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 59.246.751,00 (99,84 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 97.249,00 (0,16%). Keluarannya berupa terlaksananya administrasi tugas ASN

b.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Pagu anggaran sebesar Rp. 54.625.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 53.560.000,00 (98,05 %) dengan efisiensi sebesar Rp.1.065.000,00 (1,95%). Keluarannya berupa terlaksananya pembayaran honor pengelolaan keuangan, pemeriksa hasil pekerjaan, pejabat pengadaan dan operator komputer.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 7.950.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 7.949.800,00 (100 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 200,00 (0%).

Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

c.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Pagu anggaran sebesar Rp. 7.950.000,00. Realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan sebesar Rp. 7.949.800,00 (100 %). dengan efisiensi sebesar Rp.200,00 (0,00%). Keluarannya yaitu tersedianya administrasi barang milik daerah

d. Kegiatan Admininstrasi Umum Perangkat Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 73.897.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan Rp. 71.198.700,00 (96,35 %) dengan efisiensi sebesar Rp.2.698.300,00 (3,65 %).

Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

d.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.814.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.805.000,00 (99,50 %). dengan efisiensi sebesar Rp.9.000,00 (0,50%). Keluarannya yaitu tersedianya peralatan listrik, penerangan bangunan kantor

d.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu anggaran sebesar Rp. 47.983.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 47.783.700,00 (99,58 %). dengan efisiensi sebesar Rp.199.300,00 (0,42%). Keluarannya yaitu tersedianya bahan logistik kantor (bahan pembersih dan alat kebersihan, pengisian tabung gas, bibit tanaman dan BBM kendaraan dinas)

d.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.400.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.140.000,00 (47,50 %). efisiensi sebesar Rp.1.260.000,00 (52,50%). Keluarannya yaitu tersedianya bahan bacaan / koran , peraturan perundangan

d.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pagu anggaran sebesar Rp. 14.500.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 14.470.000,00 (99,79 %). dengan efisiensi sebesar Rp.30.000,00 (0,21%). Keluarannya yaitu tersedianya jamuan tamu dan rapat.

d.5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Pagu anggaran sebesar Rp. 7.200.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 6.000.000,00 (83,33 %). dengan efisiensi sebesar Rp.1.200.000,00 (16,67%). Keluarannya yaitu tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 259.050.000,00. Realisasi Fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 244.813.741,00 (94,50 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 14.236.259,00 (5,50 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

e.1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu anggaran sebesar Rp. 188.000.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 179.302.686,00 (95,37 %). dengan efisiensi sebesar Rp.8.697.314,00 (4,63%). Keluarannya berupa tersedianya pelayanan umum kantor.

e.2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu anggaran sebesar Rp. 550.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 466.500,00 (84,82 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 83.500,00 (15,18%). Keluarannya berupa perangko, materai dan jasa pos /pengiriman.

e.3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu anggaran sebesar Rp. 63.000.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 57.544.555,00 (91,34 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 5.455.445,00 (8,66%). Keluarannya berupa tersedianya daya listrik, air PDAM, jasa telekomunikasi.

e.4. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 7.500.000,00 (100 %). Keluarannya berupa tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 87.938.000,00 Realisasi Fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 87.489.222,00 (99,49 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 448.778,00 (0,51 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Pagu anggaran sebesar Rp. 79.358.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 79.172.150,00 (99,77 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 185.850,00 (0,23%). Keluarannya berupa terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 2 (dua) sebanyak 17 unit (5 kendaraan dinas roda empat dan 12 kendaraan dinas roda 2 (dua)

f.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Pagu anggaran sebesar Rp. 8.580.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 8.317.072,00 (96,94 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 262.928,00 (3,06%). Keluarannya berupa ter[eliharanya peralatan kerja.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 38.100.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 35.150.000,00 (92,26 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 2.950.000,00 (7,74 %). Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp. 20.600.000,00 Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 19.000.000,00 (92,23%) dengan efisiensi sebesar Rp. 1.600.000,00 (7,77%). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

a.1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 15.600.000,00. Realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan sebesar Rp. 15.600.000,00 (100 %). Keluaranya tersusunya dokumen regulasi penanaman modal

a.2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00. Realisasi fisik nihil, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.400.000,00 (68,00 %). Efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.600.000,00 (32,00%) Keluaranya Tersusunya laporan evaluasi Pemberian Fasilitasi / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota.

Pagu anggaran sebesar Rp. 17.500.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 16.150.000,00 (92,29 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 1.350.000,00 (7,71%). Keluarannya Tersusunnya buku profil investasi dan buku induk penanaman modal.

b.1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sebesar Rp. 8.750.000,00. Realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan sebesar Rp. 8.400.000,00 (96,00 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 350.000,00 (4,00%) Keluaranya jumlah dokumen rencana umum penanaman modal

b.2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sebesar Rp. 8.750.000,00. Realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan sebesar Rp. 7.750.000,00 (88,57 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (11,43%) Keluaranya sektor usaha terpetakan

3. Program Promosi Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 49.495.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 48.995.862,00 (98,99 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 499.138,00 (1,01 %). Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp. 49.495.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 48.995.862,00 (98,99 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 499.138,00 (1,01 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

a.1. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Pagu anggaran sebesar Rp. 8.750.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 8.600.000,00 (98,29 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 150.000,00 (1,71 %). Keluarannya berupa Kebijakan promosi penanaman modal

a.2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp. 40.745.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 40.395.862,00 (99,14 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 349.138,00 (0,86 %). Keluarannya berupa Jumlah kegiatan promosi penanaman modal

4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 800.465.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 748.946.473,00 (93,56 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 51.518.527,00 (6,44 %). Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 800.465.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 748.946.473,00 (93,56 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 51.518.527,00 (6,44 %) Kegiatan ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut :

a.1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pagu Anggaran sebesar Rp. 779.900.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 728.381.473,00 (93,39 %), efisiensi anggaran

sebesar Rp. 51.518.527,00 (6,61 %) Keluarannya terlaksananya sosialisasi perizinan

a.2. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

Pagu Anggaran sebesar Rp.6.000.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 6.000.000,00 (100 %), Keluarannya jumlah obyek perijinan yang dipantau dan diawasi.

a.3. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Pagu Anggaran sebesar Rp.6.975.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 6.975.000,00 (100 %), Keluarannya tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan

a.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Daerah.

Pagu Anggaran sebesar Rp.7.590.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 7.590.000,00 (100 %), Keluarannya tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 397.601.000. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 378.878.521,00 (95,29 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 18.722.479,00 (4,71 %). Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 397.601.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 378.878.521,00 (95,29 %), efisiensi anggaran sebesar Rp.18.722.479,00. (4,71 %) Program ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut:

a.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 46.865.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 46.282.121,00 (98,76 %), efisiensi anggaran

sebesar Rp.582.879,00. (1,24 %) Keluarannya jumlah perusahaan yang dipantau dan jumlah buku laporan monev .

a.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 317.636.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 306.046.400,00 (96,35 %), efisiensi anggaran sebesar Rp.11.589.600,00. (3,65 %) Keluarannya jumlah Perusahaan yang dibina.

a.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.100.000,00. Realisasi fisik 100 %, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp.26.550.000,00 (80,21 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.550.000,00. (19,79,00 %) Keluarannya jumlah laporan pengawasan penanaman modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 16.150.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 16.122.000,00 (99,83 %) dengan efisiensi sebesar Rp.28.000,00 (0,17 %). Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 16.150.000,00. Realisasi fisik 100%. realisasi keuangan sebesar Rp. 16.122.000,00 (99,83 %). Efisiensi anggaran sebesar Rp. 28.000,00 (0,17 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pagu anggaran sebesar Rp. 16.150.000,00. Realisasi fisik 100%. realisasi keuangan sebesar Rp. 16.122.000,00 (99,83 %). Efisiensi anggaran sebesar Rp. 28.000,00 (0,17 %). Keluarannya berupa jumlah dokumen yang diintegrasikan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga telah melakukan beberapa kagiatan yaitu :

1. Pelaksanaan promosi dilaksanakan dengan 2 (dua) even / kegiatan yaitu melalui media elektronik dan CJIBF, Pelaksanaan kegiatan promosi ini adalah salah satu upaya memperkenalkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Purbalingga, termasuk sektor investasi yang potensial untuk dikembangkan. Dengan adanya kegiatan promosi ini juga membuka pasar potensial bagi produk-produk Kabupaten Purbalingga untuk dipasarkan lebih luas ke luar Purbalingga.
2. Sebagai upaya peningkatan jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Purbalingga, maka DPMPTSP Kabupaten Purbalingga juga melakukan upaya peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, sosialisasi tentang perizinan dan non perizinan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Purbalingga secara bertahap. Jumlah investor yang telah menanamkan investasinya di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 sebanyak 9.344 investor dengan nilai realisasi investasinya sebesar Rp.1.499.620.359.229
3. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya perizinan dan non perizinan maka dilakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan pemegang perizinan terhadap ketentuan perizinan dan nonperizinan. Sepanjang tahun 2022 perizinan yang dilakukan pemantauan dan pengawasan sebanyak 56 izin perusahaan. Secara bertahap obyek pengawasan akan ditingkatkan guna meningkatkan tertib administrasi perizinan khususnya dalam penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) serta meningkatkan realisasi investasi.
4. Melaksanakan survei berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditujukan kepada pelaku usaha atau pengguna layanan, dimana hasil dari penilaian akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, khususnya aparatur pelayanan perizinan dan nonperizinan. Hasil pelaksanaan survei adalah 96,04 yang diklasifikasikan sebagai mutu pelayanan Sangat Baik atau bernilai A.

Tabel 2.1

**REKAPITULASI HASIL PELAKUANAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SID TAHUN 2022**

KABUPATEN PURBALINGGA

OPD	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023
				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	
1			4	5	6	7	8=(7/6)x100%	9
2								10=(5+7+9)
2	18	BIDANG PENANAMAN MODAL						
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	71,37	72,76	75,76	106 %
2	18	01	2 01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 %	100 %	100 %
2	18	01	2 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	2 dokumen	100 %
2	18	01	2 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LPPD, LKJIP, Laporan Aset, RB) Yang Tersusun	5 dokumen	5 dokumen	100 %
2	18	01	2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
2	18	01	2 02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya Terbayar Tepat Waktu	12 bulan	12 bulan	12 bulan

2	18	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kunjungan Lapangan / survey Koordinasi/ Undangan/ SPPD Dalam Daerahan Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	
2	18	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium pengelola keuangan, Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan, honor Operator Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	18	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunya LRA / LK / SPM	12 bulan	-	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	
2	18	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunya LRA / LK / SPM	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan daerah	100 %	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	18	01	2	03	06	Penatausahaan barang milik daerah	Tersedianya administrasi asset milik daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	
2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Perlebihkapan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	
2	18	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18	01	2	06	03	Penyediaan Peralataan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	
2	18	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (Koran, Peraturan Perundangan)	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %
2	18	01	2	06	07	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD	Tersedianya Jamuan Tamu dan Rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
2	18	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	2 unit	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %
2	18	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebelair baru	3 unit-	2 unit	3 unit-	-	-	3 unit	3 unit	100 %
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangko, Materai dan Jasa Pos / Pengiriman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Daya Listrik, Air PAM dan Jasa Telekomunikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
-	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua, pajak kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	-	12 bulan	-	-	-	-	-	100 %
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Score Iklim Usaha	80	78,3	78,3	78,3	100 %	80	80	100 %

2	18	02	2	01	Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pemberian Insentif	1	-	-	-	-	100 %
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya Dokumen Regulasi Penanaman Modal	1	-	-	-	100 %
2	18	02	2	01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya Evaluasi Pemberian Penanaman/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Ususian Kebijakan Lebih Lanjut	86 %	80 %	83 %	83%	100 %
2	18	02	2	02	02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Cakupan Sektor Usaha Terpetakan Menurut Potensi	1 sektor	1 sektor	1 sektor	100 %	1 sektor
2	18	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya dokumen rencana umum penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Sektor Usaha Terpetakan sampai dengan tahun N	5 sub sektor	5 sub sektor	5 sub sektor	100 %	5 sub sektor
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kepemintatan Investasi	3 investor	2 investor	2 investor	100 %	3 investor
2	18	03	2	01		Penyelegaraan Pronosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor Yang Melakukan Orientasi Investasi	10 investor	10 investor	10 investor	100 %	10 investor
2	18	03	2	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Ketersediaan dokumen kebijakan strategi Promosi Penanaman Modal	Ada	ada	Ada	-	ada
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	100 %	3 kegiatan
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Pelayanan Publik Bidang Investasi	4,00 point	3,90 point	4,51 point	114 %	4,00 point

2	18	04	2	01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani di DPMPTSP	124 jenis	124 jenis	124 jenis	100 %	124 jenis	124 jenis	100 %	100 %	
2	18	04	2	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	124 jenis	124 jenis	124 jenis	100 %	124 jenis	124 jenis	100 %	100 %	
2	18	04	2	01	01	Pemantauan dan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Prosentase Dokumen Perizinan yang di Validasi	86 %	80 %	83 %	83 %	100 %	86 %	86 %	100 %
2	18	04	2	01	02	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Prosentase (%) Penanganan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	18	04	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Pemberian Fasilitasi/Inisiatif Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ inisiatif daerah	86 Kali	80 Kali	83 Kali	83 Kali	100 %	86 Kali	86 Kali	100 %
2	18	04	2	01	04										
						PROGRAM PENGENDALIAN PEAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kepatuhan Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100	85	95	97	102,11 %	100	100	100 %
2	18	05				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	216 PM	216 PM	101 PM	98 PM	97,03 %	216 PM	216 PM	100 %
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 kali kegiatan	7 kali kegiatan	7 kali kegiatan	100 %	7 kali kegiatan	7 kali kegiatan	100 %	100 %
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (jumlah perusahaan yang dibina)	216 PM	216 PM	216 PM	100 %	216 PM	216 PM	100 %	100 %

2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (jumlah perusahaan yang diawasi)	13 kali kegiatan	13 kali kegiatan	100 %	13 kali kegiatan	13 kali kegiatan	100 %
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Tersaji Secara Up to date	34,68 %	9,68 %	23,39 %	23,39 %	100 %	34,68 %
2	18	06				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Data Yang Terintegrasi	34,68 %	9,68 %	23,39 %	23,39 %	100 %	34,68 %
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data yang Terintegrasi	43 berkas	12 berkas	29 berkas	29 berkas	100 %	43 berkas

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan terpadu. Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan tugas ini karena adanya komitmen kerja yang baik di bidang tugas masing-masing yang ada di DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022, dapat kami uraikan analisis kinerja DPMPTSP Kabupaten Purbalingga digunakan untuk mengukur/memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2024. Adapun capaian indikator pada tahun 2022 berdasarkan target renstra dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Penanaman Modal

Realisasi investasi baru dan pengembangan / perluasan sektor swasta baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.A1.

Tabel Realisasi Investasi Baru/Pengembangan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 - 2022

No	Tahun	Realisasi Investasi (Rp)
1.	2016	483.271.000.000
2.	2017	547.076.000.000
3.	2018	622.870.314.578
4.	2019	679.695.974.162
5.	2020	758.271.424.434
6.	2021	1.462.142.613.812
7.	2022	1.499.620.359.229

Tabel 2.2.A2.

Daftar Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Purbalingga Sampai Dengan Tahun 2022.

No.	Nama Perusahaan
1	PT Royal Korindah
2	PT Boyang Industrial
3	PT Indokores Sahabat
4	PT Kesan Baru Sejahtera
5	PT Sung Chang Indonesia
6	PT Sung Shim International
7	PT Hasta Pustaka Sentosa
8	PT Yuro Mustika
9	PT Hanmi Hair International
10	PT Interwork Indonesia
11	PT Du Dream International
12	PT Midas Indonesia
13	PT Milan Indonesia
14	PT Won Jin Indonesia
15	PT Ye Jin Beauty Ornament
16	PT Sophian Indonesia
17	PT Hyup Sung Indonesia
18	PT Victoria Beauty Industrial
19	PT Eye Rich
20	PT SSE Fashions Indonesia
21	PT Inter Costech Indonesia
22	PT John Toys Indonesia
23	PT Nina Venus Indonusa
24	PT Universal Fishing Gear Solutions
25	PT Buyoung Profesional Indonesia
26	PT Sumber Graha Sejahtera
27	PT Inkobuma Beauty Indonesia
28	PT Cosmoprof Indokarya

B. Bidang Pelayanan Perizinan

Kinerja layanan perizinan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.B1

Tabel kinerja layanan perizinan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021

No	Jenis Izin	Jumlah Izin Yang Diterbitkan					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan	10	11	9	380	2.517	-
2.	Izin Gangguan (HO)	772	619	-	-	-	-
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	641	922	652	655	780	322
4.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	1.004	1.036	699	442	698	444
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB	1.016	1.046	706	717	2.517	2.302
6.	IUI/TDI	30	42	59	38	72	45
7.	Izin Reklame	913	512	388	463	285	1.026
8.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	146	87	90	67	466	196
9.	Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (IMPP)	22	7	2	1	6	-
10.	Izin Pertambangan Daerah (Gol. C)	15	11	10	16	-	-
11.	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	51	36	14	10	7	10
12.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	1	-	-	14	8
13.	Izin Bidang Kesehatan	-	320	1.334	797	838	1.333
	JUMLAH	4.620	4.650	3.963	3.586	8.200	5.686

Tabel kinerja layanan perizinan tahun 2022

No	Jenis Perizinan	Nama Perizinan	Jml Izin yg diterbitkan
1	Perizinan Berusaha		
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)		7141
	b. Sertifikat Standar		
	1. Sektor Perikanan		37
	2. Sektor Pertanian		80
	3. Sektor Perdagangan		26
	4. Sektor Industri		283
	5. Sektor Komunikasi dan Informatika		4
	6. Sektor Angkutan		10
	7. Sektor Perhubungan		0
	8. Sektor Obat, Makanan dan Kesehatan		66
	9. Sektor Pariwisata		47
	10. Sektor Koperasi		0
	c. Izin		

	1. Sektor Perikanan	0	
	2. Sektor Pertanian	0	
	3. Sektor Perdagangan	0	
	4. Sektor Industri	1	
	5. Sektor Komunikasi dan Informatika	0	
	6. Sektor Angkutan	0	
	7. Sektor Perhubungan	0	
	8. Sektor Obat, Makanan dan Kesehatan	26	
	9. Sektor Pariwisata	0	
	10. Sektor Koperasi	2	
2	Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (UMKU)		
	a. Sektor Perikanan		
		Surat Izin Usaha Perikanan	0
	b. Sektor Pertanian		
		1) Pelayanan Jasa Laboratorium	0
		2) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	0
		3) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)	0
		4) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	0
		5) Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	0
		6) Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	0
		7) Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).	21
	c. Sektor Perdagangan		
		1) Tanda Daftar Gudang	11
		2) Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C);	0
		3) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	0
		4) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	0
	d. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
		1) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan	0
		2) Izin pengusahaan sumber daya air (Wilayah sungai menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota);	0
	e. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan		
		1) Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten	0
		2) Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);	0
		3) Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	2

		4) Sertifikat laik sehat - di wilayah	0
		5) Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).	453
3	Persyaratan Dasar		
	1. KKPR	PKKPR	1
		KKKPR	0
	2. PBG		118
4	Perizinan Berusaha Lainnya / Perizinan Non Berusaha		
	1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Non -Berusaha	5
	2	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	2
	3	Izin Penggunaan Aset Daerah untuk Fasilitas Olahraga	0
	4	Surat Kelayakan Operasional (SLO) kegiatan non berusaha dan atau kegiatan pemerintah	0
	5	Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator)	0
	6	Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb)	0
	7	Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan teknik reproduksi (SIPP ATR)	0
	8	Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan	0
	9	Izin Usaha Pemotongan Hewan dan / atau Penanganan Daging	0
	10	Izin Usaha Pelayanan Klinik Praktek Bersama	0
	11	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal	0
	12	Izin Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan	0
	13	Izin Penutupan Program atau Satuan Pendidikan	0
	14	Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	0
	15	Persetujuan dan pengesahan dokumen Rencana Teknis Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	0
	16	Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	0
	17	Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah	0
	18	Izin Pemanfaatan Rumah Susun	0
	19	Izin Penebangan Turus Jalan	0
	20	Izin Pelandaian Trotoar	0
	21	Persetujuan Bangunan Gedung untuk Rumah Tinggal, Bangunan Milik Permerintah dan Bangunan untuk Kegiatan Non Berusaha Lainnya	0
	22	Izin Menggunakan Tanah Pengairan	0
	23	Izin Operasional Klinik Pemerintah Non-BLU	2
5	Surat Izibn Praktek Tenaga Kesehatan		
	1	Surat Izin Praktik Dokter/ Dokter Gigi	67
	2	Surat Izin Praktik Apoteker	70

	3	Surat Izin Praktik Perawat	661
	4	Surat Izin Praktik Bidan	516
	5	Surat Izin Praktik Tenaa Teknis Kefarmasian	82
	6	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	58
	7	Surat Izin Praktik Fisioterapi	5
	8	Surat Izin Praktik Radiografer	18
	9	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	37
	10	Surat Izin Praktik Perekam Medik	53
	11	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	26
	12	Surat Izin Praktik Refraksionis atau Optisien	6
	13	Surat Izin Praktik Sanitarian	13
	14	Surat Izin Praktik Psikolo Klinis	2
	15	Surat Izin Praktik Elektromedik	5
	16	Surat Izin Praktik Penata Anestesi	10
	17	Surat Izin Praktik Okupasi Terapi	2
	18	Surat Izin Praktik Teknisi Tranfusi Darah	7
	19	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	2
Jumlah Total Izin Diterbitkan			9978

Adapun capaian indikator pada tahun 2022 berdasarkan target renstra dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisa
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023		
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	8	8	13
URUSAN PENANAMAN MODAL												
	- Pertumbuhan Nilai Investasi	7,46		12,92	11,44	10,38	92,82	23,65	11,44	10,38		
	- Nilai Realisasi Investasi	720		813	906	1.000	1.462	1.499	906	1.000		
	- Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	71,32		71,35	71,37	71,37	72,76	75,76	71,37	71,37		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
a	Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
b	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
c	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
d	Persentase pengadaan barang milik daerah	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
e	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
f												
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal												
2	Score Iklim Usaha	78,3		80	80	78,8	92,9	80	80	80	80	80
a	Jumlah Kepeminatan Investasi	2		2	3	3	2	2	3	3	3	3
3												

4	Program Pelayanan Penanaman Modal						
a	Indek Pelayanan Publik Bidang Investasi	3,90	3,95	4,00	4,10	4,42	4,51
						4,00	4,10
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						
a	Prosentase Kepatuhan Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	85	95	100	100	91	97,03
						100	100
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal						
a	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Tersaji Secara Update	9,68	23,39	34,68	64,52	12,00	23,39

3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Berikut ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Purbalingga adalah :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Daerah mencakup:
 1. Belum diterbitkanya peraturan/ ketentuan tatacara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal daerah;
 2. Terhambatnya investasi karena lahan diperuntukan industri dan infrastruktur pendukung kurang menarik bagi calon penanam modal;
 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penanaman modal.
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Promosi Penanaman Modal
 1. Belum adanya dokumen strategi promosi Penanaman Modal;
 2. Arah kebijakan potensi dan peluang investasi masih berada di tiap OPD, belum menjadi kebijakan di tingkat Kabupaten;
 3. Belum optimalnya promosi dikarenakan keterbatasan anggaran dan cakupan media promosi.
- c. Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Penanaman Modal :
 1. Belum maksimalnya pencatatan realisasi investasi berbasis LKPM (laporan kegiatan penanaman modal) karena kesadaran dan keterbatasan SDM pelaku usaha;
 2. Belum optimalnya cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal karena keterbatasan SDM, sarana prasarana dan anggaran.
- d. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pelayanan Penanaman Modal:
 1. Masih belum optimalnya koordinasi antara perangkat daerah dalam upaya peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 2. Belum semua unit melaksanakan fungsi utama bidang penanaman modal yaitu promosi, pelayanan perizinan dan pengendalian penanaman modal;
 3. Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dengan sektor lainnya.

- e. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal:
 - 1. Belum adanya inovasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu;
 - 2. Kurangnya tindak lanjut hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas :
 - 1. Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas;
 - 2. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Program prioritas pembangunan daerah memuat program - program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Sedangkan rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pada tabel berikut disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Kode	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
1	2	3	4	5	6	4.486.748.000	7	8	9	10	11	12
2 18	PENANAMAN MODAL					4.486.748.000	PENANAMAN MODAL					4.541.237.000
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Temuan lembaga pengawas yang ditindaklanjuti	100 %	3.845.893.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Temuan lembaga pengawas yang ditindaklanjuti	100 %	3.900.382.000	
2 18 01 01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.220.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.220.000	
2 18 01 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Purbalingga	Jumlah Dokumen RKA dan Renja	2 dokumen	500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Dokumen RKA dan Renja	2 dokumen	500.000	
2 18 01 01 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi (LKPJ, LPPD, LKJP, Laporan Aset, , RB) Yang Tersusun	5 dokumen	720.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi (LKPJ, LPPD, LKJP, Laporan Aset, , RB) Yang Tersusun	5 dokumen	720.000	

2	18	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Percentase termuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	100 %	2.811.327.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Percentase termuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	100 %	2.885.316.000
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah orang yang Gaji dan Tunjangannya Terbayar Tepat Waktu	20 orang	2.699.450.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah orang yang Gaji dan Tunjangannya Terbayar Tepat Waktu	20 orang	2.753.439.000
2	18	01	2	02	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Kunjungan Lapangan/ Survey/ Koordinasi/Undangan n/SPPD dalam Daerah dan Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 dokumen	84.327.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah Kunjungan Lapangan/Survei/ Koordinasi/Undanga n/SPPD dalam Daerah dan Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 dokumen	84.327.000
2	18	01	2	02	03	03	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD			Tersusunya LRA / LK /SPM	12 dokumen	27.550.000	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi	Purbalingga	Tersusunya LRA / LK /SPM	12 dokumen	27.550.000
2	18	01	2	03	03	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Percentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	100 persen	6.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingga	Percentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	100 persen	6.000.000
2	18	01	2	03	06	06	Penatausahaan barang milik daerah SKPD			Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah pada skpd	12 laporan	6.000.000	Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah pada skpd	12 laporan	6.000.000
2	18	01	2	05	05	05	Administrasi Kepegawai			Percentase jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah		Percentase jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-
2	18	01	2	05	09	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pelatihan	-	-	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Purbalingga	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-
2	18	01	2	06	06	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Percentase ketersedian administrasi umum	100 %	69.950.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Percentase ketersedian administrasi umum	100 %	69.950.000

2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah Paket Tersedianya Perlengkapan Listrik	12 paket	2.527.000	2.527.000
2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah Paket Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 paket	44.983.0000	44.983.0000
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Purbalingga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan (Koran, Peraturan Perundangan)	12 dokumen	1.440.000	1.440.000
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD	Purbalingga	Jumlah Laporan Tersedianya Jamuan Tamu dan Rapat	12 laporan	15.000.000	15.000.000
2	18	01	2	06	11	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Purbalingga	Tersedianya Jumlah Dokumen Dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik	12 dokume	6.000.000	6.000.000
								Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	759.629.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pos / Pengiriman	12 laporan	450.000	450.000
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingga	Tersedianya Daya Listrik, Air PAM dan Jasa Telekomunikasi	12 laporan	212.435.000	212.435.000
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	4.500.000	4.500.000
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Tersedianya Jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	542.244.000	542.244.000

2	18	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	197.767.000	197.767.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	197.767.000	
2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Terpeliharanya jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	17 unit	184.187.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	17 unit	184.187.000
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 unit	8.580.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 unit	8.580.000
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Unit Terpeliharanya Gedung Kantor	2 unit	5.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit Terpeliharanya Gedung Kantor	2 unit	5.000.000
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
2	18	02				Scor Iklim Usaha	80 point	38.100.000		Score Iklim Usaha	80 point		38.100.000	
2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100 %	20.600.000	Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100 %	20.600.000
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	15.600.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	15.600.000
2	18	02	2	01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Purbalingga	Tersusunya laporan evaluasi pemberian fasilitasi/Insentif dan kemudahan penanaman modal dan usulan kebijakan lebih lanjut	86 persen	5.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunya laporan evaluasi pemberian fasilitasi/Insentif dan kemudahan penanaman modal dan usulan kebijakan lebih lanjut	86 persen	5.000.000

2	18	02	2	02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Sektor Usaha Terperatakan Potensi dan Peluang usaha	1 sektor	17.500.000
2	18	02	2	02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen RUPM	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Sektor Usaha Terperatakan Potensi dan Peluang usaha
2	18	02	2	02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	1 sektor
2	18	02	2	02 01 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Profil Investasi dan Buku Induk Penanaman Modal Kajian dan Raperta Terkait Incentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen Profil Investasi dan Buku Induk Penanaman Modal Kajian dan Raperta Terkait Incentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17.500.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kepeminatan Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kepeminatan investasi
2	18	03	2	01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 investor	49.495.000	3 investor
2	18	03	2	01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10 investor	49.495.000	10 investor
2	18	03	2	01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokument	8.750.000	10 investor yang melakukan orientasi
2	18	03	2	01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	49.495.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indek pelayanan public bidang investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indek pelayanan public bidang investasi
						4 point	113.245.000	4 point
								113.245.000

				Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang terlayani di DPMPTSP	124 jenis	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang terlayani di DPMPTSP	124 jenis							
2	18	04	2	01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	113.245.000							
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik di DPMPTSP	124 jenis	124 jenis	Jumlah jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik di DPMPTSP	124 jenis	113.245.000		
2	18	04	2	01	02	01	03	Penitiban dan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Purbalingga	96.155.000	Purbalingga	96.155.000		
2	18	04	2	01	02	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Purbalingga	86 persen	6.000.000	Purbalingga	86 persen	6.000.000
2	18	04	2	01	04	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Daerah	Purbalingga	100 persen	3.500.000	Purbalingga	100 persen	3.500.000
2	18	04	2	01	04	01	04	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Purbalingga	86 kegiatan	7.590.000	Purbalingga	86 kegiatan	7.590.000
2	18	05	2	01	01	01	01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	216 pelaku usaha	423.865.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	216 pelaku usaha	423.865.000	

2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Pelaksanaan Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Pelaksanaan Penanaman Modal
						7 kegiatan/ kali	37.865.000	7 kegiatan/ kali
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
						216 pelaku usaha.	352.900.000	216 pelaku usaha
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
						13 kegiatan/ kali.	33.100.000	13 kegiatan/ kali.
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
						Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Tersaji Secara Update	16.150.000	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Tersaji Secara Update
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	34,68 persen	34,68 persen
						Persentase data yang terintegrasi	16.150.000	Persentase data yang terintegrasi
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Purbalingga	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
						Jumlah Data yang terintegrasi	43 dokumen	Jumlah Data yang terintegrasi
2	18	06	2	01	01		16.150.000	43 dokumen

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, masyarakat dapat mengusulkan melalui proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) baik pada tingkat desa atau kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Usulan program kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran strategis perangkat daerah.

Usulan program kegiatan dan sub kegiatan yang ada di rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga merupakan program kegiatan dan sub kegiatan yang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga, hal tersebut dikarenakan tidak adanya usulan dari masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus ikut mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu **“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”**.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 pada misi ke 5 yaitu *Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokasi serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.* Salah satu tujuan dari misi ke 5 yang erat kaitannya dengan penanaman modal adalah *Meningkatnya Investasi Daerah, dengan sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Daerah dan Meningkatkan Kualitas Kelembagaan.*

Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi, dengan sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Daerah dan Meningkatkan Kualitas Kelembagaan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan Pembangunan Penanaman Modal

Pada RPJMD (2016-2021), disebutkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Penanaman Modal termasuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bersama dengan

Urusan Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Peternakan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Koperasi UKM.

Peran penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi tergambar dalam persentase andil terhadap PDRB, dari Sektor Industri Pengolahan, serta Perdagangan dan Jasa, yang secara bertahab menggeser porsi bidang pertanian, disamping itu peran penanaman modal juga penghasil devisa negara dari eksport produk perusahaan dan penyerap tenaga kerja.

Pembangunan urusan penanaman modal merupakan bagian dari Misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan pembangunan urusan penanaman modal adalah Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah.

Seiring dengan tujuan pembangunan urusan penanaman modal, maka *tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah Meningkatnya investasi daerah.*

3.2.2 Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah : ***"Meningkatnya daya tarik investasi di daerah dan Meningkatkan Kualitas Kelembagaan"***

Target Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Sasaran Pada tahun 2024
1		Pertumbuhan Nilai Investasi	10,38
2	Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi	1.000.000.000.000,00
	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan DPMPTSP	Nilai SAKIP	71,37

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tabel 3.1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbaingga adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun (Rp. Juta)				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan nilai Investasi	7,46	12,92	11,44	10,38	9,30	9,79
		Meningkatnya daya tarik investasi di daerah	Nilai realisasi investasi	720.000	813.000	906.000	1.000.000	1.093.000
		Meningkatkan Kualitas Kelembagaan DPMPTSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	71,32	71,35	71,37	71,37	71,40

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(Memuat Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif)

4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dapat dilihat melalui usulan rincian anggarannya sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Usulan Anggaran	+/-
		2023	2024	
.	Belanja	4.201.373.000,-	4.201.373.000,-	0,-
	- Langsung	4.201.373.000,-	4.201.373.000,-	0,-

Secara keseluruhan program kegiatan dan sub kegiatan pada Anggaran Belanja Dinas Penanaman adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

TAHUN 2023

No.	Nama Program	Banyak Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 keg	3.560.518.000
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2 keg	38.100.000
3.	Program Promosi Penanaman Modal	1 keg	49.495.000
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1 keg	113.245.000
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 keg	423.865.000
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 keg	16.150.000
Jumlah		12 keg	4.201.373.000

Adapun Program kegiatan Tahun 2024 terdiri atas :

- I) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 kegiatan sebagai berikut;
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
dengan 2 sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Indikator : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
Indikator : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator : Persentase temuan pengelolaan anggaran yang di tindaklanjuti dengan 3 sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Indikator : Jumlah orang, yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
Indikator : Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator : Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator : Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan
dengan 1 sub kegiatan
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
Indikator : Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator : Persentase ketersediaan administrasi umum kantor
dengan 5 sub kegiatan :
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
Indikator : Jumlah paket komponen listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor
Indikator : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.

- c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator : Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
 - d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Indikator : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi SKPD
 - e. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
Indikator : Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistema pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD .
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator : Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan 3 sub kegiatan :
- a. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Indikator : Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
 - b. Penyediaan jasa surat menyurat
Indikator : Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat.
 - c. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
 - d. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator : Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Indikator : Persentase pemeliharaan barang milik daerah.
dengan 3 sub kegiatan :
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Indiktaor : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya.
Indikator :Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelihara
 - c. Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainya.
Indikator : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara/rehabilitasi

- II) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Indikator: Score iklim usaha dengan 2 kegiatan sebagai berikut;
1. Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. .
Indikator : Prosentase ketersediaan dokumen evaluasi pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal.
dengan 2 sub kegiatan :
 - a. Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitasi/ insentif dan kemudahan penanaman modal
Indikator : Jumlah peraturan daerah (perda) dalam pemberian fasilitasi / insentif dan kemudahan penanaman modal.
 - b. Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal
Indikator : Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah.
 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah sektor usaha terpetakan potensi dan peluang investasi dengan 2 sub kegiatan :
 - a. Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota
Indikator : Jumlah peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/ kota
 - b. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/ kota
Indikator : Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/ kota.
- III) Program Promosi Penanaman Modal, Indikator: Jumlah kepeminatan investasi dengan 1 kegiatan sebagai berikut;
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah investor yang melakukan orientasi investasi dengan 2 sub kegiatan :
 - a. Menyusun strategi promosi penanaman modal
Indikator : Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/ kota

b. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota
indikator : Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/ kota.

IV) Program Pelayanan Penanaman Modal, Indikator: Indek pelayanan publik bidang investasi dengan 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator : Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang terlayani di DPMPTSP dengan 4 sub kegiatan :

a. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Indikator : Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara periodic.

b. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Indikator : Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal

c. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Indikator : Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

d. Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah

Indikator : Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitasi/ insentif daerah..

V) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Indikator: Peresentase kepatuhan perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dengan 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator : Jumlah kepatuhan perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman Modal (LKPM).

dengan 3 sub kegiatan :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal
Indikator : Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
Indikator : Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Indikator : Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan.

VI) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Indikator : Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersaji secara update dengan 1 kegiatan sebagai berikut :

- 1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator : Persentase data yang terintegrasi dengan 1 sub kegiatan :
 - a. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
Indikator : Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan

Tabel 4.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

Kode	Urusan/	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Indikatif	Target Capaian Kinerja	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	18	PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Temuan lembaga pengawas yang ditindaklanjuti		100 %	3.560.518.000		Temuan lembaga pengawas yang ditindaklanjuti	100 %	3.900.382.000		
2	18 01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.220.000		Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.220.000		
2	18 01 2 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	2 dokumen	500.000	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	500.000	
2	18 01 2 01 01			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	5 laporan	720.000	APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	720.000	
2	18 01 2 01 07			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti		100 %	2.743.243.000		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100 %	2.865.316.000	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	20 org/bln	2.646.520.000	APBD	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 org/bln	2.753.439.000	

2	18	01	2	02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Purbalingga	12 dokumen	69.173.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	84.327.000
2	18	01	2	02	04		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD	Purbalingga	12 dokumen	27.550.000	APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD	12 dokumen	27.550.000
2	18	01	2	03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	Purbalingga	100 persen	6.000.000	APBD	Percentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	100 persen	6.000.000
2	18	01	2	03	06		Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd	Purbalingga	12 laporan	6.000.000	APBD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd	12 laporan	6.000.000
2	18	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase ketersediaan administrasi umum		100 persen	60.950.000		Percentase ketersediaan administrasi umum	100 persen	69.950.000
2	18	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Purbalingga	12 paket	2.527.000	APBD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	2.550.000
2	18	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Purbalingga	12 paket	40.483.000	APBD	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	45.000.000
2	18	01	2	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Purbalingga	12 dokumen	1.440.000	APBD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	1.440.000
2	18	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Purbalingga	12 laporan	10.500.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 laporan	15.000.000
2	18	01	2	06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD	Purbalingga	12 dokumen	6.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD	12 dokumen	6.000.000

2	18	01	2	08		Percentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2	18	01	2	09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.
2	18	01	2	09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
							Percentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						100 persen	760.129.000

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							Score iklim usaha	82 point	38.100.000
2	18	02					80 point	38.100.000	
							Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Merjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah dalam pemberian fasilitasi/incentif dan kemudahan penanaman modal
2	18	02	2	01			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100 %	20.600.000
2	18	02	2	01	01		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Purbalingga	1 dokumen
2	18	02	2	01	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Purbalingga	89 kegiatan usaha
2	18	02	2	02			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sektor Usaha Teripetakan Potensi dan Peluang usaha	17.500.000
2	18	02	2	02	01		Jumlah peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/ kota	Purbalingga	1 dokumen
2	18	02	2	02	02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	8.750.000

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							Jumlah Kepemilikan Investasi	3 investor	49.495.000	Jumlah Kepemilikan Investasi	3 Investor	49.495.000		
2	18	03					Penyeleenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor Yang Melakukan Orientasi	10 investor	49.495.000	Jumlah investor Yang Melakukan Orientasi	10 investor	49.495.000	
2	18	03	2	01			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/ kota	Purbalingga	1 dokumen	8.750.000	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/ kota	1 dokumen	8.750.000
2	18	03	2	01	01		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Purbalingga	3 dokumen	40.745.000	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	3 dokumen	40.745.000
							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indek Pelayanan Publik Bidang Investasi	4,10 (point)	113.245.000	Indek Pelayanan Publik Bidang Investasi	4,20 (point)	113.245.000	
2	18	04					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani di DPMPTSP	124 jenis	113.245.000	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani di DPMPTSP	124 jenis	113.245.000	
2	18	04	2	01			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Purbalingga	124 Pelaku usaha	96.155.000	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	124 jelaku usaha	96.155.000
2	18	04	2	01	01									

			Pemantauan Pemerintahan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Purbalingga	89 kegiatan usaha	6.000.000	APBD	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	89 kegiatan usaha	6.000.000			
2	18	04	2	01	02									
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkejolannya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Purbalingga	100 orang	3.500.000	APBD	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkejolannya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	100 orang	3.500.000
2	18	04	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi/penerimaan pemberian fasilitasi/ insentif daerah	Purbalingga	89 kegiatan	7.590.000	APBD	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi/penerimaan pemberian fasilitasi/ insertif daerah	89 kegiatan	7.590.000
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Percentase Kepatuhan Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			Percentase Kepatuhan Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		Percentase Kepatuhan Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		
2	18	05	2	01	01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Merjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Purbalingga	7 kegiatan.	37.865.000	APBD	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	7 kegiatan.	37.865.000

2	18	05	2	01	02			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Purbalingga	216 pelaku usaha
2	18	05	2	01	03	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Purbalingga	352.900.000
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Purbalingga	DAK
2	18	06	2	01	01	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	216 pelaku usaha
						Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Tersaji Secara Update	64.52 Persen	352.900.000
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyalian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Purbalingga	DAK
						Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 kegiatan	33.100.000
2	18	06	2	01	01	Jumlah negarai usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 kegiatan	216 pelaku usaha
						Jumlah negarai usaha dan pelaku usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	13 kegiatan	33.100.000

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi	persen	10,38	
2	Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi	rupiah	1.000.000.000.000,00	
	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan DPMPTSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	71,37	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dipastikan mempedomani Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 - 2026, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Demikian penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan Pembangunan dibidang Penanaman Modal secara umum untuk meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah

meningkatnya daya tarik investasi di daerah dan meningkatnya kualitas kelembagaan atas pelayanan perizinan dengan tingkat keberhasilan yang optimal sehingga sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Maret 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga



Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19681022 199402 1 001